

Pelaporan Wakil Ketua KPK Alexander ke Polda Metro Perlu Diteliti Lebih Lanjut

JAKARTA (IM) - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan, pelaporan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata ke Polda Metro Jaya karena bertemu dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang oleh KPK, perlu dicermati lebih lanjut.

“Menurut ICW pelaporan terhadap Alexander Marwata atas dugaan melakukan pertemuan dengan pihak yang saat ini sedang berperkara di KPK ke Polda Metro Jaya perlu dicermati lebih lanjut,” kata Diky melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (23/4).

Pasalnya, pihak KPK menyebutkan, pertemuan Alexander dengan Eko Darmanto tersebut dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

KPK juga menyatakan, Alex turut didampingi oleh staf direktorat aduan masyarakat KPK

dan atas sepengetahuan Pimpinan KPK yang lain.

“Jika keterangan KPK benar, maka kepolisian keliru menerapkan Pasal 36 huruf a UU KPK,” ujarnya.

Diky mengetakan, memang benar pimpinan KPK dilarang bertemu dengan pihak yang berperkara.

Namun, merujuk pada Bab I angka 10 Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2021 yang menyebutkan, bahwa setiap insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.

“Berdasarkan kondisi demikian, maka Polda Metro Jaya sepatutnya tidak melanjutkan proses hukum terhadap Alex,” ucapnya. ● han

3.614 Rumah Rusak Akibat Erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara

JAKARTA (IM) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.614 rumah rusak sedang hingga berat akibat terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara.

“Estimasi rumah terdampak ini rusak bervariasi dari berat, sedang, hingga ringan itu 3.614 rumah, ini terdampak,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, dikutip Selasa (23/4).

Sementara itu, Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan per Senin 22 April 2024, jumlah pengungsian mulai berkurang sebelumnya 6.045 jiwa kini tersisa 3.582 jiwa, termasuk dari dua Desa di Pulau Gunung Ruang.

“Hingga Senin, data terakhir pagi yang kita terima dari rekan-rekan kita yang masih ada di Pulau

Tagulandang dan Posko Manado itu Senin pagi total pengungsi dari 6.045 jiwa ini, tersisa 3.582 jiwa. Ini termasuk yang 834 jiwa dari 2 Desa di Pulau Gunung Ruang,” ujar Aam.

“Itu totalnya saat ini 3.582, kurang 834 itu yang 834 itu adalah penduduk yang memang belum bisa kembali karena rumahnya rusak sangat rusak parah di Pulau Gunung Ruang ditambah dengan masyarakat Tagulandang yang masih masuk daerah tempat kilometer yang harus dikosongkan dengan status level 3,” tambahnya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sudah menurunkan status Gunung Ruang dari Level IV atau Awas menjadi Siaga atau Level III. Aktivitas Gunung Ruang kini hanya sebatas mengeluarkan asap dan beberapa aktivitas vulkanik yang tidak signifikan. ● mei

Asset Recovery, KPK Setor Rp2,1 Miliar ke Kas Negara

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyetorkan sejumlah uang kepada kas negara sebesar Rp2,1 miliar.

Uang tersebut merupakan hasil pembayaran denda dan uang pengganti dari para terpidana dari kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya Persero Tahun 2018 hingga 2020.

Kepala Bagian Pem-

beritaan KPK, Ali Fikri menyatakan, uang tersebut berasal dari terpidana Trisna Sutisna, Elly Tri Pangestu, Itong Isnaini dan Wahyudi Hardi.

“Besaran setoran adalah Rp2,1 Miliar,” kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/4).

Ali menjelaskan, kewajiban pembayaran uang pengganti Trisna Sutisna, Itong Isnaini Hidayat dan Elly Tri Pangestu dinyatakan lunas.

Sementara itu, pembayaran denda dari Elly Tri Pangestuti dan Wahyudi Hardi lunas dibayarkan dan Itong Isnaini Hidayat masih pembayaran cicilan pertama.

“Penyetoran ini adalah bagian dari komponen *asset recovery* yang dilakukan KPK sebagai wujud eksekusi putusan pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap,” katanya. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



Presiden Jokowi: Tuduhan Kecurangan di Pilpres 2024 Tak Terbukti, Ini Penting

Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bekerja untuk negara, setelah ada putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sangat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, yang terpenting adalah pertimbangan hukum yang disampaikan MK menyatakan tuduhan dugaan kecurangan oleh pemerintah selama pilpres tidak terbukti.

“Ya pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah, seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah. Ini,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai peresmian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sulawesi Barat, sebagaimana dilansir laman resmi Presiden RI, Selasa (23/4).

Schingga, Presiden mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bekerja untuk

negara. Sebab saat ini banyak faktor eksternal geopolitik yang mempengaruhi kondisi internal semua negara di dunia.

Selain itu, Kepala Negara juga menyatakan mendukung proses transisi dari pemerintahan yang baru nanti. Presiden Jokowi berjanji segera menyiapkan proses transisi tersebut.

“Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok ya,” katanya.

Sebelumnya, dalam pembacaan putusan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 MK menyatakan menolak gugatan secara keseluruhan.

Kedua perkara itu masing-masing diajukan oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin

dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi, dan digelar pemungutan suara ulang. Anies-Muhaimin juga memasukkan petitem alternatif, yakni diskualifikasi hanya untuk Gibran.

Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Sebab dalam PKPU itu, syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu.

Di samping itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Pranowo juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), juga terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945 berkaitan dengan nepotisme Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk bantu mendongkrak suara Prabowo-Gibran.

MK dalam putusannya menilai tidak ada hubungan antara penyaluran bansos terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. MK pun menolak dalil pasangan calon

presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang menuding bansos sebagai salah satu alat kecurangan.

MK juga menolak sejumlah dalil lain yang diajukan pasangan Anies-Muhaimin maupun pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Rinciannya yakni dalil dugaan mobilisasi aparat desa dan pendidikan, dugaan pelanggaran kampanye oleh Men-

MENTERI PERTANIAN TINJAU ALAT BANTU POMPA AIR

Mentan Andi Amran Sulaiman (kanan) didampingi Ditjen PSP Kementan Ali Jamil (ketiga kanan) dan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana (kedua kanan) meninjau bantuan alat pompanisasi di Desa Kandang, Kec. Comal, Kab. Pemalang, Jateng, Selasa (23/4). Kementan menyerahkan bantuan alat pompanisasi sebanyak sekitar 10 ribu pompa air untuk petani di Jateng dengan Kab. Pemalang sebanyak sekitar 300 unit pompa yang bertujuan sebagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui program pompanisasi.

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dalam sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pemohon meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengulang pemungutan suara.

Putusan penolakan tersebut dibacakan di ruang sidang MK, pada Senin (22/4/2024) oleh Ketua Hakim Konstitusi, Suhartoyo.

Tidak hanya Anies, permohonan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga mengalami nasib yang sama, ditolak MK. Dengan putusan MK tersebut, maka berakhir sudah rangkaian kompetisi Pilpres 2024 dan menyatakan suara yang diperoleh Prabowo-Gibran sebesar 58,6 persen dari total suara sah sebagai pemenangnya.

“Keputusan MK hari ini menjadi penanda berakhirnya seluruh proses Pilpres 2024,” kata Muhaimin.

Anies dan Muhaimin memang tidak langsung menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran, setelah ada keputusan MK. Baru pada pukul 19.50 WIB, Anies-Muhaimin memberikan pernyataan resmi melalui siaran video yang sudah direkam sebelumnya. Dalam video itu, Anies memberikan ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran atas kemenangan mereka berdua di Pilpres 2024.

“Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat

yang kini diembankan di atas pundak Bapak-bapak berdua,” tutur Anies.

Dalam video tersebut, Anies juga menyinggung harapan yang ia titipkan kepada Prabowo untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Prabowo sebagai seorang patriot. Sebab itu seorang patriot selanjutnya menjaga demokrasi yang ada di Indonesia.

“Maka Prabowo tentu paham, bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara. Menjaga keseimbangan dan independensi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif,” ucap Anies.

Ja juga menitikpikan pesan agar Prabowo bisa menjamin kebebasan media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Dengan menjaga kebebasan berpendapat dan berkumpul untuk rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

“Dan sebagai seorang patriotik, menurut saya, Prabowo akan mengembalikan dan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia kedepan,” katanya.

Rasa Kecewa

Meski telah menerima kekalahan di Pilpres 2024, pasangan Anies-Muhaimin mengungkapkan rasa kecewa terhadap proses pemilu ini. Cak Imin mengatakan, putusan MK sebagai simbol tak ada yang bisa menghentikan laju pelemahan demokrasi di Indonesia.

“Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan, putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta,” katanya.

Sedangkan Anies beberapa kali menyinggung proses pemilu yang dinilai problematik dan reformasi yang tergerus oleh nepotisme.

“Perlu sensitivitas kita semua untuk terus-menerus menjaga agar amanat reformasi tidak tergerus walaupun proses penggerusannya berjalan pelan-pelan, sedikit-sedikit yang seringkali membuat kita terlena,” katanya.

Sebab itu, dia memberikan pesan kepada para pendukungnya agar tetap menjaga staminanya karena perjuangan untuk gerakan perubahan masih panjang. ● han



SESI PEMBELAJARAN OPERASI SAR DI MAKASSAR

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo menyampaikan sambutan saat membuka Sesi Pembelajaran Operasi SAR di Makassar, Sulsel, Selasa (23/4). Pembelajaran operasi SAR pada tanggap darurat bencana nasional dan internasional tersebut untuk meningkatkan kinerja Basarnas serta memperkuat interoperabilitas antar pemangku kepentingan secara luas dalam memberikan layanan jasa pencarian dan pertolongan.

PENGUMUMAN			
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KIRANA CITRA CAKRAWALA (Dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Utara, tanggal 28 Maret 2024, Nomor 45, yang dibuat dihadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:			
1. Menyetujui dan mengesahkan Neraca Akhir Likuidasi Perseroan;			
2. Menyetujui menerima pertanggungjawaban Likuidator Perseroan;			
3. Menyetujui untuk tidak memberikan honorarium kepada Likuidator Perseroan;			
4. Menyetujui memberhentikan dan membubarkan Likuidator Perseroan.			
Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:			
Andy Indigo Jalan Raya Pluit Selatan, Blok S Nomor 8 J Penjaringan Jakarta, 24 April 2024 Likuidator			

mandiri PENGUMUMAN			
Telah dilakukan Pengalihan Piutang atau Cessie PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 28 Maret 2024 dengan keterangan sebagai berikut :			
No	Nama Debitur	Alamat	Nilai Pengalihan Piutang (Cessie)
1	Sudjana Hidayat pada PK tertulis Sudjana Hidayat bdn Toko Djaya (Makmur)	Jelambar Kav. Polri Blok F1/1444, Jakarta	Rp.132.870.437,25.- • Imang Halim yang bertempat tinggal di KP Babakan No.8 RT.001 RW. 003 Kel. Babakan Kec. Setu.
2	Rahayu Busana Garment	Jl.Kalibata Utara No.25 RT.008/002, Kalibata, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Rp.262.152.194,00.- • Imang Halim yang bertempat tinggal di KP Babakan No.8 RT.001 RW. 003 Kel. Babakan Kec. Setu.
3	PT. Ciptasatria Eka Prima	Jl. Blak No. 84 AB Jakarta Pusat	Rp.317.498.088,00.- • Imang Halim yang bertempat tinggal di KP Babakan No.8 RT.001 RW. 003 Kel. Babakan Kec. Setu.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka TMT 28 Maret 2024 seluruh kewajiban hutang kredit debitur tersebut telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan diatas.			
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Collection & Recovery Center Jakarta Wisma Mandiri II Lt. 17 Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta 10340 Telp. (021) 3002 3002			
Demikian untuk diketahui semua pihak.			
Ttd, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Collection & Recovery Center Jakarta			

mandiri PENGUMUMAN	
Telah dilakukan Pengalihan Piutang atau Cessie PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 28 Maret 2024 dengan keterangan sebagai berikut :	
1) Nama Debitur PT. Japark Utama.	
2) Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp.408.757.083,00.-	
3) Cessionaris a.n Mujahid Kholidi yang bertempat tinggal di Taman Sari Persada Block H2 No. 14B RT. 006, RW. 015 Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sereal Kota Bogor	
Sehubungan dengan hal tersebut, maka TMT 28 Maret 2024 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama PT. Japark Utama telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.	
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Collection & Recovery Center Jakarta	

mandiri PENGUMUMAN	
Telah dilakukan Pengalihan Piutang atau Cessie PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 26 Maret 2024 dengan keterangan sebagai berikut :	
1) Nama Debitur PT. Gunabangun Polakarya.	
2) Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp. 305.203.654,00.-	
3) Cessionaris a.n Andri Purwanto, SH yang bertempat tinggal di KP. Makambata 1 RT. 013 RW. 006 Kel. Sukadalem, Kec. Waringincurung, Serang.	
Sehubungan dengan hal tersebut, maka TMT 26 Maret 2024 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama PT. Gunabangun Polakarya telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.	
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Collection & Recovery Center Jakarta	